



**WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN TERHADAP PERJANJIAN
KERJASAMA PENGELOLAAN HUTAN MASYARAKAT ADAT PAPUA**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum.**

Oleh

**NDARIUS KOBOGAU
NIM. 2021025015028**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS

**WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN TERHADAP PERJANJIAN
KERJASAMA PENGELOLAAN HUTAN MASYARAKAT ADAT PAPUA**

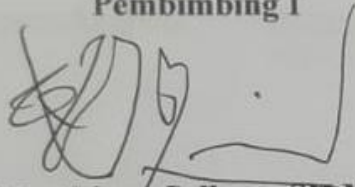
Diajukan Oleh

**NDARIUS KOBOGAU
NIM. 2021025015028**

**Disetujui Untuk Diujikan
Pada tanggal.....**

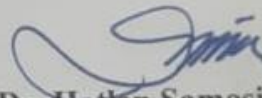
Oleh

Pembimbing I



**Dr. Marthinus Sollossa, SH., M.Hum
NIP. 19620212199003 1 002**

Pembimbing II



**Dr. Hotlan Samosir, SH., M.H
NIP. 196506101994 1 003**

Mengetahui

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**



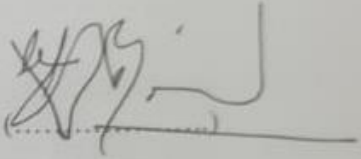

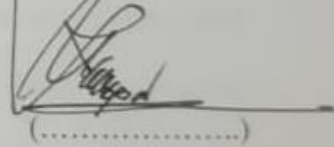
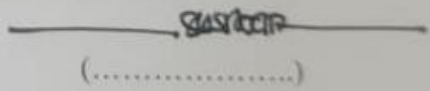
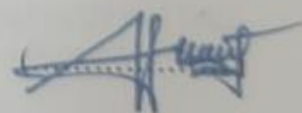
**Dr. Marthinus Mambaya, SH., M.H
NIP. 19660302 199303 1 002**

PELAKSANAAN UJIAN

WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN TERHADAP PERJANJIAN
KERJASAMA PENGELOLAAN HUTAN MASYARAKAT ADAT PAPUA

Telah diujikan didepan Dewan Penguji Ujian Tesis
Pada hari/tanggal, Jumat, 19 Juli 2024

Dewan Penguji

Ketua/Anggota	: <u>Dr. Marthinus Sollossa, S.H., M.Hum</u> NIP.19620212199003 1 002	
Sekretaris/Anggota	: <u>Hotlan Samosir, S.H., M.H</u> NIP : 196506101994 1 003	
Anggota	: <u>Johan Rongalaha, S.H., M.Hum</u> NIP : 19600828 199003 1 003	
Anggota	: <u>Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H</u> NIP : 19730619 200312 1 001	
Anggota	: <u>Dr. Yusak Elisa Reba, S.H., M.H</u> NIP : 19750210 200112 1 003	

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Jayapura, 29 juni 2023
Yang membuat Pernyataan,

NDARIUS KOBOGAU
NIM. 2021025015028

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul kewenangan majelis rakyat Papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan hutan masyarakat adat Papua.”

Tujuan penelitian ini adalah bahwasanya untuk mengetahui memenang majelis rakyat Papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama dalam pengelolaan sumber daya di Provinsi Papua dan apa faktor- factor yang membengaruhi wewenang majelis rakyat Papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pengelolaan huta masyarakat adat di Provinsi Papua;

Metode yang digukana dalam pelitian ini adalah: penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengamati ketentuan peraturan perundang-undangan dan melihat implementasinya secara langsung dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini penunjukan bahwa wewenang majelis rakyat Papua (mpr) dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama pengerlolahan hutat masyakat adat; sebagaimana di amanatkan dalam pasal 20 huruf (d)UU otsus- Papua, pasal 39 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2004 serta pasal 14 peraturan daerah khusus nomor 4 tahun 2008 yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewemang MRP selama ini tidak pernah dilaksanakan hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua yang adalah harus orang asli Papua. Hasil penelitian lainnya terkait faktor- faktor yang membengaruhi wewenang majelis rakyat Papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pengelolaan hutan masyarakat adat’ adalah keterbatasan sumber daya manusia yang paham tentaang pengetahuan hukum (undang- undang), selian itu majelis rakyat Papua mengabaikan kewenangan yang diamanatkan dalam UU otsus dan focus pada politik yang adalah bukan kewenangan majelis rakyat Papua. Hasil penelitian ini membuktikan bawah MRP selama kurang lebih 20 tahun tidak pernah memperjuangkan hak -hak masyarakat adat Papua yang adalah amanat UU otsus dan focus pada politik yang adalah bukan fungsi atau kewenannganya majelis rakyat Papua.

Kata kunci: Wewenang, MRP, Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Papua

ABSTRACT

This research is entitled "The Authority of the Papuan People's Assembly in Providing Considerations on Cooperation Agreements in Indigenous Community Forest Management".

The aim of this research is to determine the authority of the Papuan People's Assembly in granting approval to work agreements for resource management in Papua Province and the factors that influence the authority of the Papuan People's Assembly in granting approval for Indigenous Community Forest Management."

The method used in this research is normative legal research, namely research that observes statutory provisions and sees their implementation directly in society.

The research results show that the MRP has the authority to approve cooperation agreements for Indigenous Community Forest Management." as stipulated in Article 20 letter (d) of the Special Autonomy Law-Papua, Article 39 of Government Regulation Number 54 of 2004 and Article 14 of Special Regional Regulation Number 4 of 2008 which regulates the implementation of the duties and authority of the MRP so far has never been implemented, this is because IUPHHK Forest management of indigenous communities in Papua Province has so far been carried out by the central government, the working relationship between the central government and the Provincial and Regency City Governments is only coordination. Other research results related to factors that influence the authority of the Papuan people's assembly in giving approval to Indigenous Community Forest Management are law enforcement factors, (laws), infrastructure, legal culture which are carried out by central government organs.

Keywords : *Authority, Majelis Rakyat Papua, Indigenous community forest management*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah dan Kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu” (Matius 6:33)

Persembahan :

Dengan Tulis hati Tulisan ini Ku persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang sangat aku sayangi
2. Kedua saudara/ ku yang aku sayangi
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan perkenaa-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat masukan dalam penyempurnaan penulisan Tesis ini.

Penyelesaian penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang bersifat materil maupun moril, maka pada kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Oscar.Oswal Wamrau, S.E.M.M selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti pendidikan pada Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi S.H..M.A selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Dr. Marthinus Mambaya .SH.M.H selaku ketua Prodi Magister(S2) Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti pendidikan S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Dr. Dr. Marthinus.Sollossa.SH.M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak membantu membimbing di setiap proses penyusunan Tesis ini .
5. Dr. Hotlan Samosir.S.H. M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu membimbing di setiap proses penyusunan Tesis ini .
6. Para dewan penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji Tesis ini .
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan ilmu bagi penulis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua

8. Serta staf administrasi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
9. Rekan-rekan seangkatan 2021

Jayapura, Juni 2024

Penulis,

Ndarius Kobogau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Teori Negara Hukum.....	20
B. Teory Efektifitas Hukum.....	25
C. Teori Kewenangan.....	31
D. Perlindungan Hukum.....	43
E. Sarana Perlindungan Hukum.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam memberikan Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Rencana Kerjasama Terhadap Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Di Provinsi Papua49	
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Papua.....	73

BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82